

Naskah 4 – Kandungan KBB: Perlindungan dari paksaan

Dimensi penting dari KBB adalah hak untuk mendapat perlindungan dari paksaan. Paksaan adalah suatu kondisi ketika seseorang menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk membuat Anda melakukan sesuatu.

Dimensi utama dari kebebasan beragama atau kepercayaan adalah bahwa setiap orang berhak untuk memiliki atau mengubah agama atau kepercayaan mereka. Dengan kata lain, beragama atau berkepercayaan serta ekspresinya bersifat sukarela.

Inilah yang dijelaskan oleh hak atas perlindungan dari paksaan: Tidak ada satu pihak pun, baik itu negara, pemimpin agama maupun orang atau organisasi apapun yang berhak untuk memaksakan kepercayaan atau praktik atas kepercayaan mereka kepada orang lain. Termasuk juga tidak berhak untuk membuat orang lain memiliki, mempertahankan, atau mengubah agama atau kepercayaannya.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat (2)

“Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.”

Dimensi ini tidak hanya melarang negara untuk memaksa warga negaranya, tetapi juga memberi tugas kepada negara untuk melindungi orang-orang dari ancaman maupun kekerasan dari orang atau kelompok lain di dalam masyarakat.

Namun demikian, di seluruh dunia kita dapat melihat contoh-contoh paksaan dalam bentuk ancaman, kekerasan maupun hukuman seperti denda dan penjara. Paksaan juga bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih halus, seperti misalnya menawarkan pekerjaan dengan syarat mengubah agama, atau menghentikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan ketika seseorang menolak untuk menganut agama atau kepercayaan tertentu.

Terkadang negara terlibat dalam pemaksaan, baik secara resmi melalui pembentukan hukum (legislasi), maupun melalui tindakan pejabat di tingkat daerah.

Komunitas Baha’i adalah kaum agama minoritas terbesar di Iran. Sejak revolusi 1979, Baha’i telah mengalami penganiayaan secara sistematis sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang memaksa mereka untuk berpindah agama ke Islam. Dalam kurun



waktu 10 tahun setelah revolusi, lebih dari 200 penganut Baha'i dibunuh, ratusan lainnya disiksa atau dipenjara, dan puluhan ribu lainnya kehilangan akses pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak lainnya, hanya karena kepercayaan agamanya.

Hingga Desember 2017, terdapat 97 penganut Baha'i yang ditahan karena kepercayaannya, termasuk 6 pemimpin Baha'i di tingkat nasional.

Contoh ini menunjukkan adanya keterkaitan antara diskriminasi dan paksaan. Para penganut Baha'i di Iran dilarang menjadi mahasiswa di universitas serta menjadi pegawai negeri sipil. Aturan yang diskriminatif ini bersifat memaksa. Ketika seorang mahasiswa atau pegawai diketahui sebagai penganut Baha'i, mereka dihadapkan pada dua pilihan antara masuk Islam atau kehilangan status mereka (sebagai mahasiswa atau pegawai).

Terkadang kelompok nasionalis atau ekstrimis memaksa orang-orang untuk mengubah agama atau kepercayaan mereka. Daesh, atau yang disebut juga dengan ISIS, memaksa penganut Yazidi dan Kristen untuk berganti agama, dan membunuh mereka yang menolaknya. Sementara di India, ada pemaksaan untuk mengganti agama menjadi Hindu dalam kaitannya dengan kekerasan komunal yang melibatkan kelompok nasionalis-Hindu. Di Myanmar, terdapat dokumentasi kasus-kasus ketika para tentara memaksa orang-orang Kristen, di bawah ancaman senjata, agar mereka melepaskan iman mereka dan berpindah ke agama Buddha. Di beberapa bagian Republik Afrika tengah, umat Islam juga diancam akan ditembak kecuali mereka masuk/pindah ke agama Kristen.

Meskipun larangan pemaksaan secara formal berlaku terkait hak untuk memiliki, mengadopsi, atau mengubah agama atau kepercayaan, ada juga paksaan dalam praktik beragama, dari negara atau anggota masyarakat lainnya. Isu yang bisa menggambarkan bentuk paksaan ini adalah cara berpakaian perempuan. Beberapa negara memiliki aturan hukum yang mengharuskan perempuan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama, sementara negara-negara yang lain melarang penggunaan pakaian perempuan yang sesuai dengan ajaran agamanya. Para perempuan dapat mengalami pelecehan dari orang-orang di luar komunitas agamanya ketika mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan ajaran agama mereka, dan juga mengalami pelecehan dari orang-orang di dalam komunitas agama mereka ketika para perempuan ini tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Banyak tipe orang yang bisa mengalami pemaksaan. Di banyak negara, orang-orang dengan ide atau praktik keagamaan yang berbeda dari ideologi negara atau norma sosial mengalami pemaksaan. Minoritas, ateis, orang-orang yang berganti agama, serta orang dengan agama yang dipandang 'asing' sering mendapat pemaksaan. Dan di dalam kelompok-kelompok keagamaan, orang-orang yang dianggap menyimpang, menodai, atau tidak mempraktikkan agama secara benar dapat terkena pemaksaan untuk



mengubah kepercayaan dan praktik mereka. Pemaksaan yang dilakukan oleh negara, keluarga, atau komunitas mereka.

Dapat disimpulkan, pemaksaan dapat meliputi ancaman, kekerasan, diskriminasi atau hukuman seperti denda dan penjara, serta dapat datang dari negara, atau dari orang-orang dan kelompok-kelompok di masyarakat. Dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan untuk dipaksa, hukum Hak Asasi Manusia internasional tidak hanya melarang negara melakukan pemaksaan, tetapi juga memberi tugas negara untuk melindungi orang-orang dengan bertindak secara efisien untuk mencegah dan menghentikan pemaksaan yang terjadi di masyarakat.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai perlindungan atas pemaksaan, termasuk teks-teks dokumen hak asasi manusia yang membahas topik ini dalam materi pelatihan pada situs web.